



LAPORAN TAHUNAN 2012

MAHKAMAH AGUNG RI



Jakarta, 13 Maret 2013

mahkamahagung.go.id



Mengawali penyampaian laporan tahunan ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya lah, penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung RI ini dapat terlaksana pada hari ini. Sejak tahun 2004, Mahkamah Agung mentradisikan pembacaan laporan tahunan di hadapan publik. Ini tiada lain sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas publik.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Sepanjang tahun 2012, Mahkamah Agung mendapatkan banyak cobaan berat. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan tekad Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”. Mahkamah Agung RI senantiasa bekerja keras melaksanakan program-program yang telah digariskan dalam Cetak Biru Pembaruan peradilan 2010-2035.

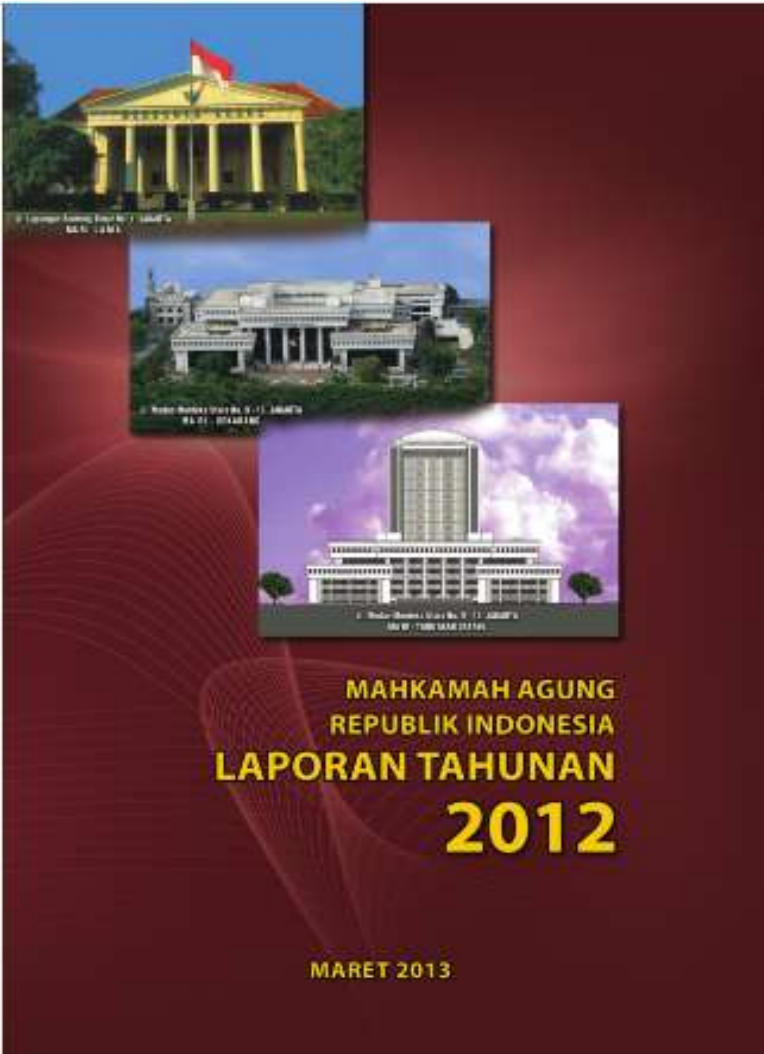


<http://www.mahkamahagung.go.id>



Semoga Laporan tahunan ini mampu menyuguhkan ulasan yang utuh tentang kinerja dan capaian Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya di sepanjang tahun 2012. Kami berharap masyarakat dapat memberikan penilaian obyektif terhadap capaian-capaian yang diraih. Kami terus bekerja lebih keras lagi. Kritikan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami hargai dalam rangka mengevaluasi diri untuk masa yang akan datang.





- Langkah dan Kebijakan Pembaruan Peradilan
- Manajemen Perkara**
- Akses terhadap Keadilan
- Pengawasan Internal**
- Manajemen SDM, Anggaran dan Aset
- Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan**
- Peran Serta dan Partisipasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Forum Internasional
- Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung**





Menuju

**PEMBARUAN
YANG BERKELANJUTAN**



<http://www.mahkamahagung.go.id>



sebelas catatan penting

Perjalanan MA di Tahun 2012



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Pertama



Mahkamah Agung berhasil melakukan pemilihan pucuk pimpinan tertinggi di institusinya secara demokratis, fair dan transparan. Ketua baru yang menggantikan Dr. Harifin A Tumpa, SH. MH yang memasuki masa purna bakti pada bulan Februari 2012 merupakan Ketua Mahkamah Agung RI yang ke 13 yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Kedua

Tahun 2012 merupakan tahun dimana Mahkamah Agung paling banyak “kehilangan “ hakim

agungannya, baik sebagai akibat dari tibanya masa purna bhakti, karena mangkat, dan karena alasan lainnya, yaitu:

1. **Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH** Ketua MA (1 Maret 2012)
2. **Atja Sondjaja, SH.** Ketua Muda Perdata (1 Mei, 2012)|
3. **Prof Dr. Mieke Komar, SH., LLM** (1 April 2012)|
4. **Imam Haryadi, SH., MH** (1 Mei 2012,) ,
5. **Dirwoto, SH., MH** (1 Mei 2012,)
6. **Dr.Mansyur Kertayasa, SH., MH** (1 Agustus 2012,)
7. **Prof. Dr.Ahmad Sukardja, SH., MA** (1 September 2012),
8. **Prof. Rehngena Purba, SH., MS** (1 Desember, 2012)
9. **Ahmad Yamani, SH. MH** (Desember 2012),
10. **Muhammad Taufik,SH., MH** (wafat : 17 Desember 2012)
11. **Djoko Sarwoko, SH., MH** Ketua Muda Pidana Khusus (1 Januari 2013.)





Ketiga

Pada tahun ini merupakan tahun dengan *clearance rate* yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Idealnya dalam waktu tertentu *clearance rate* harus berada di atas 100%. Hal ini disebabkan kurangnya hakim agung. Implementasi system kamar yang saat ini diterapkan menuntut spesialisasi hakim. Ini tidak sederhana pada sistem lama, dimana majelis yang pensiun bisa diganti oleh hakim anggota dari kamar lainnya. Namun, dari sisi produktifitas atau rata-rata per hakim agung, penurunan tersebut hanya sebesar 0,03%.



Keempat



Pengesahan tiga aturan penting untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh keadilan yang lebih proporsional, dan memenuhi prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
2. SEMA RI nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif..
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 026 KMA/SK /II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.

<http://www.mahkamahagung.go.id>

Kelima



MA telah membentuk Tim Penghubung dan Kelompok Kerja, yang kemudian menghasilkan 4 (empat) peraturan bersama MA-KY sebagai berikut:

- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim



Keenam

Telah diselesaikannya proses Penjaminan Mutu Reformasi Birokrasi (*Quality Assurance*) di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh tim eksternal *Quality Assurance* dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Ketujuh



Pada tahun 2012 Mahkamah Agung berpartisipasi dalam kompetisi *Open Government Indonesia* yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dua produk layanan yang diajukan sebagai unggulan Mahkamah Agung RI untuk diajukan, yaitu :

1. **Layanan keperkaraan Mahkamah Agung (One Day Publish)**
2. **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**





Selain itu, pada tahun 2012, bersama dengan 11 Kementerian/Lembaga Negara lain, Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan Anugerah **Parahita Ekapraya** dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anugrah ini diberikan kepada Kementerian/lembaga yang dipandang menaruh perhatian pada program dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak sesuai **Inpres No. 9 Tahun 2000** tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Kedelapan

Kemajuan dalam proses penggunaan dan akuntabilitas anggaran.

Dari alokasi pagu anggaran 2012 sebesar 5,057 triliun rupiah, Mahkamah Agung berhasil menyerap **95,07%**. Prosentase serapan anggaran ini **berada di atas nilai realisasi rata-rata nasional yang berada di angka 88,86%**. Prosentase realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2012 ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2010 dan 2011 yang berturut-turut hanya berhasil menyerap 74,71% dan 77,99%.



Kesembilan



Pada tahun 2012 terjadi perbaikan kesejahteraan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding serta Hakim Ad Hoc.

- Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2012, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada dibawah Mahkamah Agung.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.



Kesepuluh



Tahun 2012 ini mencatat untuk pertama kali dalam sejarah peradilan, bahwa atas usulan Mahkamah Agung sendiri, seorang hakim agung diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan diberhentikan dengan tidak hormat pada tanggal 12 Desember 2012 lalu.

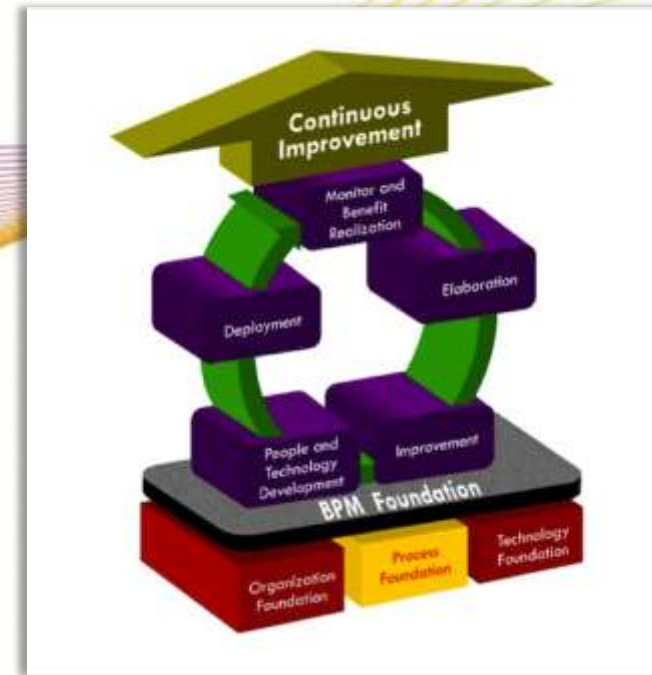


<http://www.mahkamahagung.go.id>



Kesebelas

Pada tahun tersebut dilakukan penataan ulang proses manajemen perkara (*business process reengineering*) pada Mahkamah Agung dan tingkat pertama serta tingkat banding





- Optimalisasi komunikasi data antara pengadilan tingkat pertama, banding dengan Mahkamah Agung
- Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 155/KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung, bekerjasama dengan *Federal Court of Australia* yang didukung oleh AusAID melalui program *Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* telah melakukan program magang bagi beberapa asisten hakim agung pada pengadilan-pengadilan di Australia
- Pengembangan dan replikasi sistem manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi bagi pengadilan tingkat pertama dan banding. Pada Pengadilan Umum solusinya adalah Sistem Pelacakan Perkara (*Case Tracking System*) yang didukung oleh USAID- C4J, sementara pada Pengadilan Agama, solusinya adalah SIADPA Plus yang dikelola sendiri oleh Ditjen Badilag



SEMA Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan,

Mahkamah Agung mengatur agar semua sidang perkara tipikor dan/atau perkara yang menarik perhatian publik direkam melalui media audio visual. Hasil rekaman tersebut wajib dimasukkan kedalam berkas upaya hukum untuk kepentingan pemeriksaan tingkat selanjutnya.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Bagian Kedua

KINERJA PENANGANAN PERKARA



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Keadaan Perkara



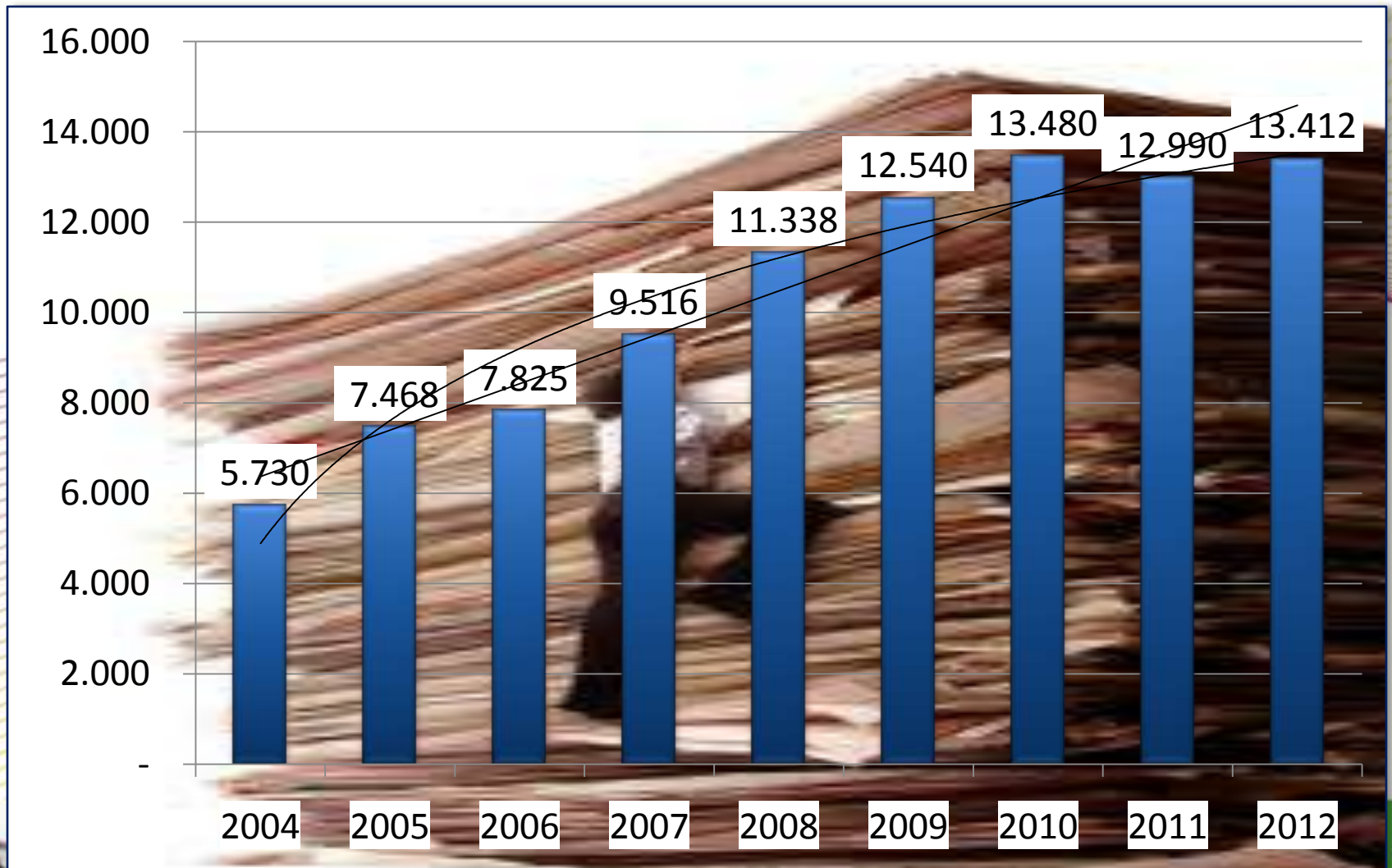
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah Beban	Putus	Sisa
A.	Perkara					
1	Kasasi	5,847	10,753	16,600	8,816	7,784
2	Peninjauan Kembali	1,827	2,570	4,397	2,136	2,261
3	Grasi	17	37	54	11	43
4	Hak Uji Materil	4	52	56	28	28
	Jumlah 2012	7,695	13,412	21,107	10,991	10,116
	Jumlah 2011	8,424	12,990	21,414	13,719	7,695
	Perbandingan 2012-2011		3.25%	-1.43%	-19.88%	31.46%
B.	Non Perkara					
1	Permohonan Fatwa	0	22	22	22	0
2	Sengketa Kewenangan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	22	22	22	0



Grafik Perkara Masuk MA

2004-2012



Perbandingan Keadaan Perkara dan Jumlah Hakim Agung 2011-2012



2011

54 hakim agung

Beban: 21.414

Putus: 13.719 perkara

Clearance Rate: 117,19

@=254,1 perkara

2012

44 hakim agung

Beban : 21.107

Putus: 10.995 perkara

Clearance rate: 93,42%

@ = 249,9 perkara

-4,2
perkara

www.mahkamahagung.go.id

Perbandingan



Keadaan Perkara Tahun 2011-2012

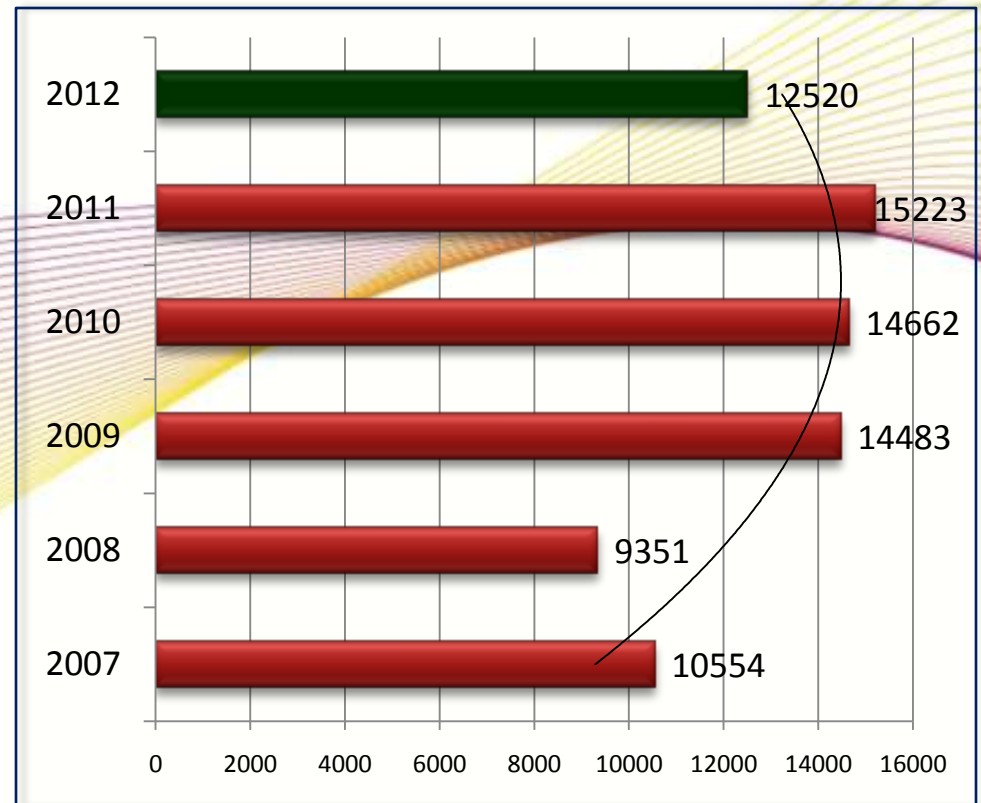
Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa Akhir	% Putus
2012	7695	13412	21107	10991	10116	52,07%
2011	8424	12990	21414	13719	7695	64,07%
Selisih		422	-307	-2728	2421	
% Selisih		3,25%	-1,43%	-19,88%	31,46%	-11,99%
		↑ naik	↓ turun	↓ turun	↑ naik	↓ turun



Rasio Penyelesaian Perkara (Clearance Rate) 2007-2012



No.	Tahun	Masuk	Dikirim Kembali	Clearance Rate %
1	2007	9.516	10.554	110,91%
2	2008	11.338	9.351	82,47%
3	2009	12.540	14.483	115,49%
4	2010	13.480	14.662	108,77%
5	2011	12.990	15.223	117,19%
6	2012	13.402	12.520	93,42%



Kondisi Perkara Aktif (masih berada di Mahkamah Agung)



Keterangan	Desembe r 2007	Desembe r 2008	Desembe r 2009	Desem ber 2010	Desembe r 2011	Desembe r 2011
Total Perkara Beredar	20.319	21.749	19.306	18.780	16.547	17.876
Total perkara Masuk	9.516	11.338	12.540	13.480	12.990	13.412
Total Perkara Dikirim	10.554	9.351	14.483	14.662	15.233	12.520
% Pengembalian VS Masuk	110,91%	82%	115%	108,77 %	117,19%	93,35%
Jumlah Perkara 1-12 Bulan	2.722	5.129	11.417	11.670	10.272	11.709
Jumlah Perkara 12-24 Bulan	10.803	11.066	5.011	4.570	3.501	3.567
Jumlah Perkara 24 Bulan ke atas	6.794	5.554	2.878	2.540	2.774	2.600
Jumlah	20.319	21.749	19.306	18.780	16.547	17.876
% Jumlah Perkara 1-12 Bln Vs Beredar	13,40%	23,58%	59,14%	62,14%	62,08%	65,50%
% Jumlah Perkara >12 Bln Vs Beredar	86,60%	76,42%	40,86%	37,86%	37,92%	34,50%



Tunggakan Perkara



Perkara **Belum Putus** dan/atau sudah putus tetapi **belum diminutasi** dan usianya sudah **diatas satu tahun** atau 30 hari untuk perkara tertentu

Belum Putus
[2449]

+

Belum Minutasi
[1.513]

3.962



<http://www.mahkamahagung.go.id>

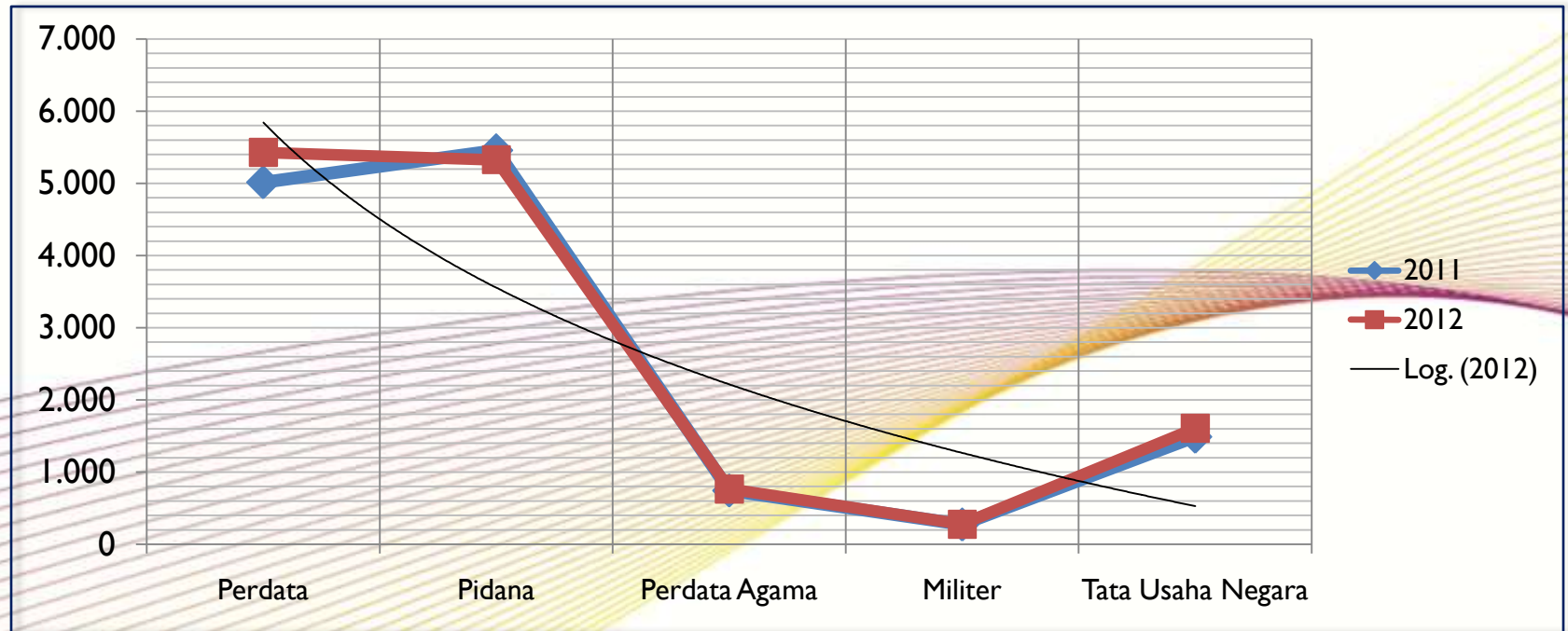


Perbandingan Jumlah Hakim Agung, Rata-rata Beban, dan Produktivitas

No	Tahun	Jumlah Hakim Agung	Jumlah Beban	Jumlah Beban Rata-rata	Jumlah Perkara Putus	Produktivitas Rata-Rata Hakim Agung
1	2011	54	21.414	396,56	13719	254,06
2	2012	44	21.107	479,70	10995	249,89
% 2012-2011		-18,52%	-1,43%	20,97%	-19,86%	-1,64%



Trend line Perkara Masuk 2011-2012



No.	Jenis Perkara	2011	%	2012	%
1	Perdata	5.016	38,61%	5.430	41,80%
2	Pidana	5.458	42,02%	5.328	41,02%
3	Perdata Agama	747	5,75%	767	5,90%
4	Militer	277	2,13%	279	2,15%
5	Tata Usaha Negara	1.492	11,49%	1.608	12,38%
	Jumlah	12.990		13.412	



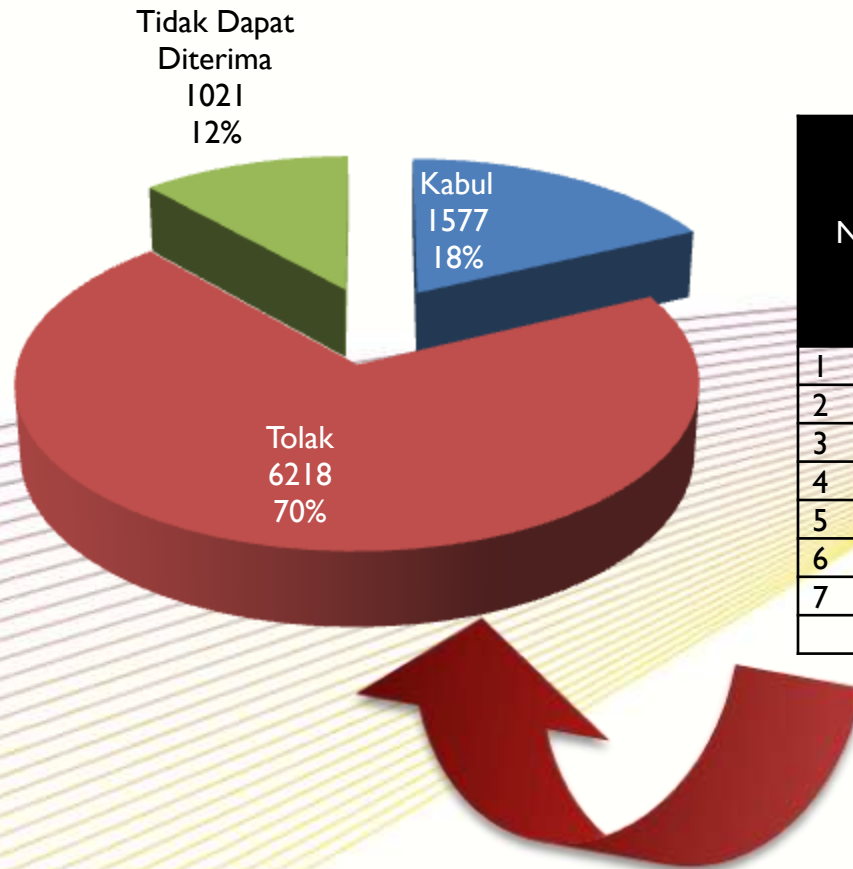
KEADAAN PERKARA KASASI

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% putus
Perdata	2.416	3.525	5.941	2.662	3279	44,81%
Perdata Khusus	292	897	1.189	830	359	69,81%
Pidana	1.374	2.314	3.688	2.014	1674	54,61%
Pidana Khusus	1.340	2.526	3.866	2.027	1839	52,43%
Perdata Agama	147	726	873	582	291	66,67%
Pidana Militer	83	253	336	206	130	61,31%
TUN	199	512	711	495	216	69,62%
Jumlah	5.851	10.753	16.604	8.816	7.788	

- ❑ Jumlah perkara masuk naik 3,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.336 perkara.
- ❑ Jumlah perkara putus turun 19,62% dari tahun 2011 yang berjumlah 10.968 perkara.
- ❑ Jumlah Sisa perkara kasasi naik 33,13% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.847 perkara.



Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2012



No	Jenis Perkara	Jml Putus	Amar			Ket
			Kabul	Tolak	Tidak Dapat Diterima	
1	Perdata	2.662	377	2.195	90	
2	Perdata Khusus	830	194	592	44	
3	Pidana	2.014	271	1.256	487	
4	Pidana Khusus	2.027	580	1.189	255	
5	Perdata Agama	582	76	461	45	
6	Militer	206	19	148	39	
7	Tata Usaha Negara	495	60	377	61	
	Jumlah	8.816	1.577	6.218	1.021	





KEADAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

No	Jenis Perkara	Sisa 2011	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir	% Putus
1	Perdata	565	799	1,364	738	626	54,11%
2	Perdata Khusus	49	209	258	163	95	63,18%
3	Pidana	88	140	228	131	97	57,46%
4	Pidana Khusus	214	312	526	166	360	31,56%
5	Perdata Agama	17	41	58	38	20	65,52%
6	Militer	12	25	37	19	18	51,35%
7	Tata Usaha Negara	882	1.044	1.926	881	1.045	45,74%
	Jumlah	1.827	2.570	4.397	2.136	2.261	48,58%

- ❑ Jumlah perkara masuk naik 1,18% dari tahun 2011 yang berjumlah 2.540 perkara.
- ❑ Jumlah perkara putus turun 19,34% dari tahun 2011 yang memutus perkara sebanyak 2.648 perkara.
- ❑ Jumlah sisa perkara naik 23,75% jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang berjumlah 1.827



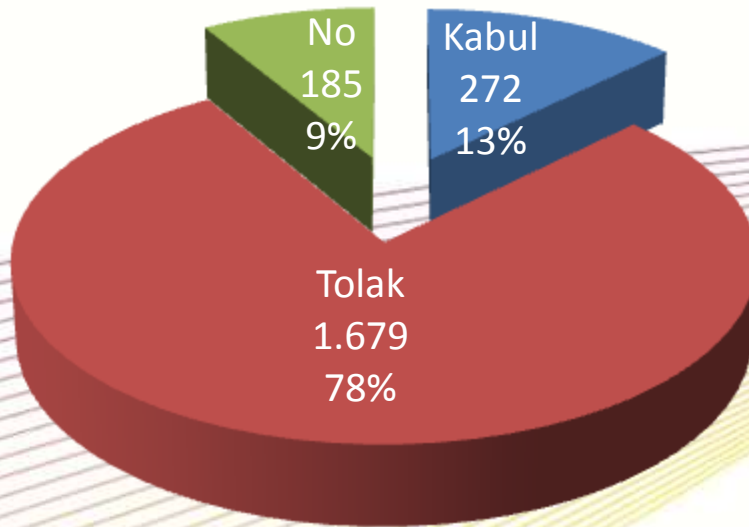
Putusan yang Diajukan Permohonan PK Tahun 2012



No.	Jenis Perkara	Jumlah	Putusan yang diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1	Perdata	799	0	723	43	33
2	Perdata Khusus	209	0	189	0	20
3	Pidana	140	2	113	15	10
4	Pidana Khusus	312	0	259	22	31
5	Perdata Agama	41	0	26	4	11
6	Militer	25	0	24	0	1
7	Tata Usaha Negara	1,044	0	135	18	891
Jumlah		2.570	2	1.469	102	997
Prosentase			0,08%	57,16%	3,97%	38,79%



Kualifikasi Amar Putusan PK Mahkamah Agung Tahun 2012



Jenis Perkara	Jumlah	Kabul	Tolak	NO
Perdata	738	108	583	47
Perdata Khusus	163	15	144	4
Pidana	131	5	59	67
Pidana Khusus	166	22	110	34
Perdata Agama	38	2	31	5
Militer	19	0	17	2
Tata Usaha Negara	881	120	735	26
Jumlah	2.136	272	1.679	185
		12,73%	78,60%	8,66%



Keadaan Permohonan Hak Uji Materiil



NO	JENIS PERATURAN	JUMLAH
1	Peraturan Pemerintah	8
2	Keputusan Presiden	3
3	Peraturan Daerah	10
4	Peraturan Menteri	13
5	Keputusan Menteri	3
6	Keputusan KPU	1
7	Peraturan KPU	2
8	Peraturan DPRD	1
9	Peraturan Dirjen Perbendaharaan	1
10	Peraturan Bupati	2
11	Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1
12	Keputusan Gubernur	1
13	Keputusan Rektor	1
14	Peraturan Kepala Bpn	1
15	Peraturan Walikota	1
16	Peraturan Gubernur	1
TOTAL		52

- Mahkamah Agung berhasil memutus perkara hak uji materiil sebanyak 28 perkara
- Rasio penyelesaian perkara permohonan hak uji materiil tahun 2012 mencapai angka 53,85%



Keadaan Perkara Grasi



jenis perkara	siswa	Masuk	jml beban	Putus/Per timbangan	Sisa
Pidana Umum	11	10	21	9	12
Pidana Khusus	6	26	32	6	26
Pidana Militer	-	1	1	0	1
Jumlah	17	37	37	15	39

Khusus perkara pidana khusus yang diterima tahun 2012, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 6 perkara, 4 perkara dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk ditolak permohonannya dan 2 perkara dipertimbangkan untuk dikabulkan.



Keadaan Permohonan Fatwa



Selama tahun 2012, Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 22 permohonan, dan semuanya telah terjawab di tahun 2012



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan



Tingkat Peradilan	Sisa 2011	Masuk 2012	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
Tk. Pertama	119.443	4.045.419	4.164.862	3.757.675	28.260	378.927
Tk. Banding	2.305	13.027	15.332	12.731	85	2.516
Jumlah	121.748	4.058.446	4.180.194	3.770.406	28.345	381.443

Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 ini mengalami penurunan hingga 22,05% dari tahun 2011 yang menerima 5.206.222 perkara.



Keadaan Perkara Tingkat Pertama



Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Umum	37.715	3.628.727	3.666.442	3.375.559	6.549	284.334
Agama	72.158	404.968	477.126	371.457	21.711	83.958
Militer	419	2.832	3.251	2.673	-	578
TUN	435	1.540	1.975	1.433	-	542
Pajak	8.716	7.352	16.068	6.553	-	9.515
Jumlah	119.443	4.045.419	4.164.862	3.757.675	28.260	378.927

Perbandingan

Tahun	Sisa	Masuk 2012	Jumlah	Putus	cabut	Sisa
2012	119.443	4.045.419	4.164.862	3.757.675	28.260	378.927
2011	110.655	5.191.482	5.302.137	5.152.480	22.495	127.162
Rasio Perbandingan	7,94%	-22,08%	-21,45%	-27,07%	25,63%	197,99%





- Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 3.757.675 perkara, atau 90,22 % dari keseluruhan beban perkara. 28.260 perkara perdata dicabut oleh para pihak (0,68%). Sisa perkara pada akhir Desember 2012 berjumlah 378.927 perkara (9,10%).
- Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia sebesar 90,10 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan bisa menekan sisa perkara di level 9,26 %.
- Perkara yang ditangani pengadilan didominasi oleh perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) berjumlah 3.282.032 perkara. (80,87% dari keseluruhan perkara atau 96,51% dari keseluruhan perkara pidana)





Rincian Keadaan Perkara Banding masing-masing Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2012

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Umum	1905	9498	11403	9379	65	1959
Agama	200	2334	2534	2253	20	261
Militer	29	431	460	346	0	114
TUN	171	764	935	753	0	182
Jumlah	2305	13027	15332	12731	85	2516



Implementasi

SISTEM KAMAR DI MA-RI



Sejumlah peraturan untuk implementasi sistem kamar:

- a) Surat Keputusan KMA Nomor 142 tahun 2011 tentang Pedoman Implementasi Sistem Kamar :
- b). Surat Keputusan Nomor KMA 143 tahun 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c). SK KMA Nomor 144 tahun 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia,
- d). Surat Keputusan KMA Nomor 164 tahun 2011 Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia,
- e). SK KMA No. 017 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung.



Kelompok Kerja

IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR



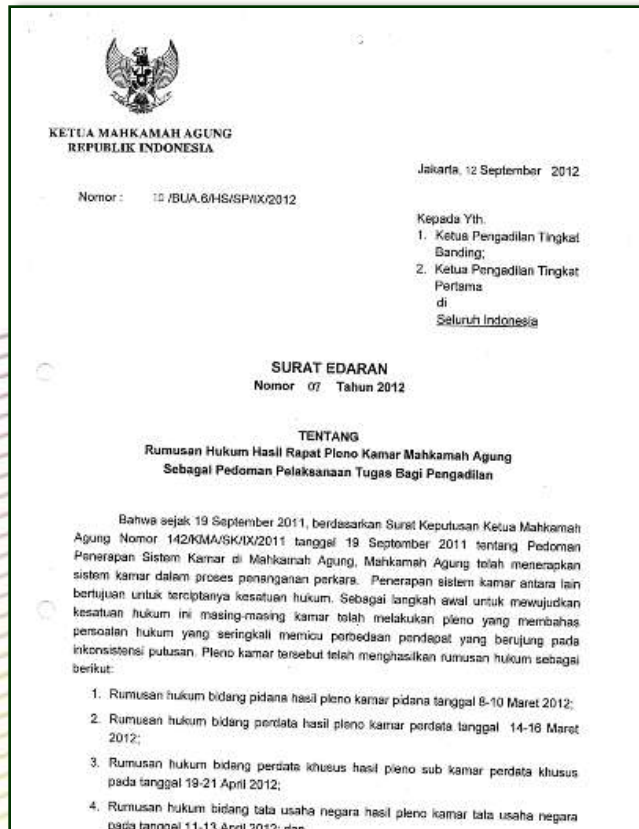
SK KMA Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI melalui. Pokja ini memiliki tiga mandat, sebagai berikut :

- Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan Sistem Kamar; dan
- Menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2014;
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati.





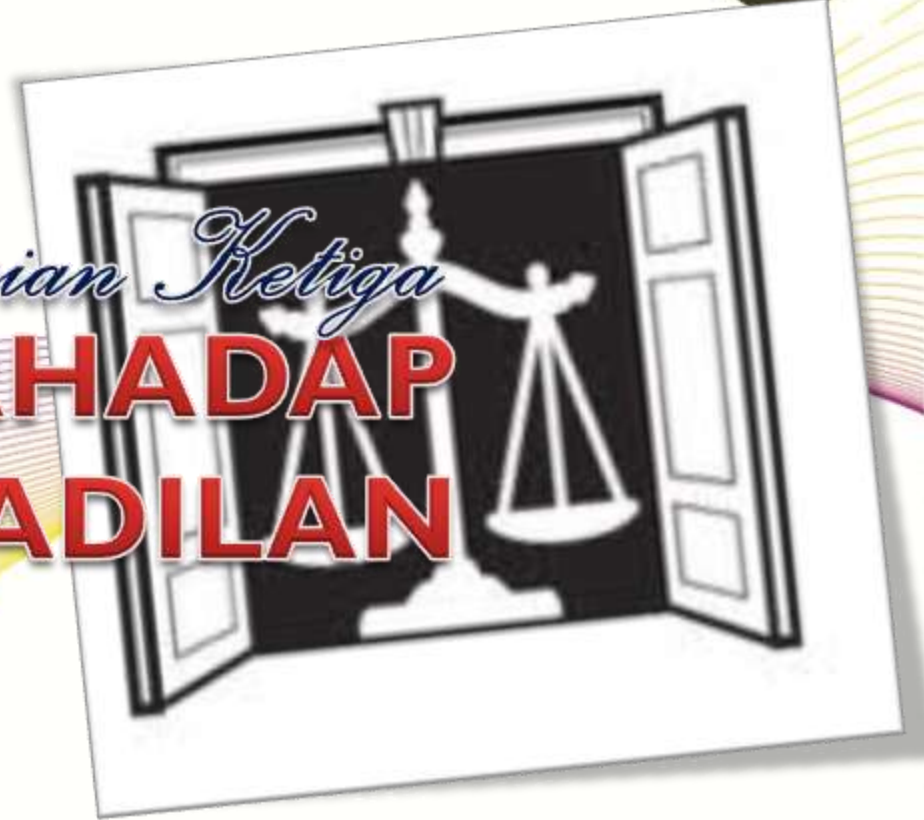
SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan



SEMA ini mengukuhkan bahwa hasil rapat pleno kamar, selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus **menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding** sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.



Bagian Ketiga
**AKSES TERHADAP
KEADILAN**

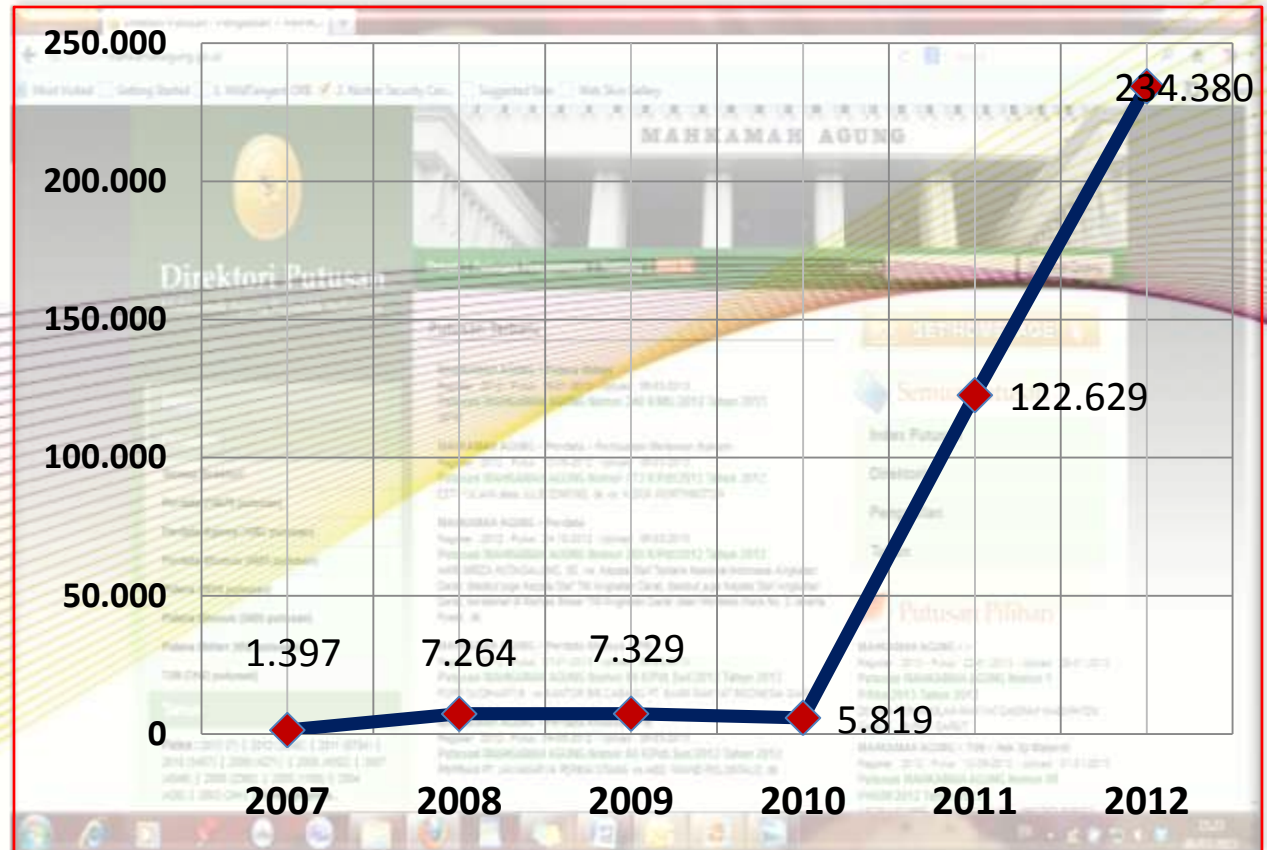


<http://www.mahkamahagung.go.id>



Keterbukaan Informasi : Akses terhadap Putusan Pengadilan

Tahun	Jumlah Publikasi	% Progres
2007	1.397	
2008	7.264	419,97%
2009	7.329	0,89%
2010	5.819	-20,60%
2011	122.629	2007,39%
2012	234.380	91,13%
Jumlah	378.818	





Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal

- Surat Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.UM.01.01-75 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum:

“disepakati bahwa untuk tahun 2012 Mahkamah Agung tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan bantuan hukum, sehingga pada tahun 2012 fokus Mahkamah Agung adalah melaksanakan masa transisi sebaik-baiknya dan menyiapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum pada tahun 2013”



Pelaksanaan Bantuan Hukum

Di Lingkungan Peradilan Umum



- Pada 2012 telah mengalokasikan anggaran operasional Pos Bantuan Hukum bagi 39 Pengadilan Negeri Kelas I.A dan I.A Khusus. Saat ini lebih dari 150 Pengadilan Negeri Kelas I.B dan Kelas II sudah menyediakan ruang Pos Bantuan Hukum. Kegiatan ini bekerja sama dengan 228 lembaga penyedia jasa advokat dan telah melayani 42.505 pencari keadilan.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Pelaksanaan Bantuan Hukum

Di Lingkungan Peradilan Agama



- **Sidang keliling** yang dilaksanakan pada 273 lokasi, telah memproses 23.675 perkara dengan jumlah penggunaan anggaran sebesar 3,6 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat 27,63% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.549 perkara.
- **Pelaksanaan program prodeo** terhadap 12.243 perkara dengan penggunaan anggaran sebesar 2,1 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat 16,52% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.507 perkara.
- **Pelayanan bantuan hukum** menghabiskan biaya 3,27 milyar rupiah untuk melayani 55.860 pencari keadilan pada 69 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 59,56% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35.009 orang.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Pelaksanaan Bantuan Hukum

Di Lingkungan Peradilan TUN



- **Pelaksanaan program bantuan hukum** dialokasikan di 5 pengadilan, yaitu PTUN Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung, dengan anggaran berjumlah 250 juta rupiah,
- **Perkara Prodeo** dialokasikan di 30 pengadilan anggaran keseluruhan sebesar 225 juta rupiah. Pada PTUN realisasinya, PTUN Jakarta menyerap anggaran Rp9.600.000 dan PTUN Surabaya tersisa anggaran sebesar Rp117.000. Sedangkan pada PTUN Medan, PTUN Makassar dan PTUN Bandung tidak ada satu pun pencari keadilan yang mengajukan gugatan secara cuma-cuma.
- Untuk perkara prodeo dari 30 PT TUN/PT TUN hanya PTUN Surabaya yang menangani satu perkara sengketa kepegawaian secara prodeo.



Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah untuk TKI di Luar Negeri



- Sidang istbat nikah di Tawau (Malaysia) memeriksa sebanyak 491 permohonan istbat nikah dari pasangan suami-isteri WNI/TKI di wilayah tersebut.
- Sidang itsbat nikah di Kota Kinabalu (Malaysia) memeriksa 295 permohonan istbat nikah dari pasangan suami-isteri WNI/TKI dari wilayah Pantai Barat, wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Pedalaman, Kudat, Lahat Datu dan Sarawak.

Lokasi	Jumlah Permohonan		Kabul		Tolak		Gugur	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Tawau	-	494	-	473	-	18	-	3
Kinabalu	367	295	335	147	27	1	5	147

Beberapa Hal Penting dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum



Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.UM.01.01-55 tanggal 29 Desember 2012 Perihal Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan :

- Konfirmasi kewenangan Mahkamah Agung terhadap Posbakum dan oleh karenanya posbakum bisa berjalan seperti biasa.
- Bahwa seluruh permohonan bantuan jasa advokat terhitung 1 januari 2013 dapat diteruskan ke Kantor Wilayah Kemhukham yang relevan
- Surat tersebut secara definitif menetapkan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2011 hanya terbatas pada pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum atau pemberian bantuan jasa advokat. Sementara itu pemberian jasa lain berupa Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum masih merupakan kewenangan pengadilan.



Respon Positif Publik atas SEMA 06 Tahun 2012



- Pengadilan Negeri Tabanan berhasil mendapatkan piagam penghargaan atas catatan rekor Pengadilan Negeri yang terbanyak sebagai Penyelenggara Pendukung Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Melampui Batas Waktu Satu Tahun Terbanyak dari Museum Rekor Indonesia (MURI), sebanyak 2.568 perkara yang sudah disidangkan di sidang keliling seluruhnya dari 13 Kecamatan.
- Rekor MURI juga telah diberikan kepada PN Simalungun bersama dengan Bupati Simalungun atas rekor "Sidang Pencatatan Akte Kelahiran di atas Kapal Pertama di Dunia" di Danau Toba dengan jumlah pemohon 1.130 perkara.





Bagian Keempat

Alokasi dan Realisasi



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Serapan Anggaran MA

- Dari alokasi pagu anggaran 2012 sebesar 5,057 triliun rupiah, Mahkamah Agung berhasil menyerap **95,07%**. Prosentase serapan anggaran ini berada **di atas nilai realisasi rata-rata nasional** yang berada di angka **88,86%**.
- Prosentase realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2012 ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan angka realisasi tahun 2010 dan 2011 yang berturut-turut hanya berhasil menyerap 74,71% dan 77,99%.



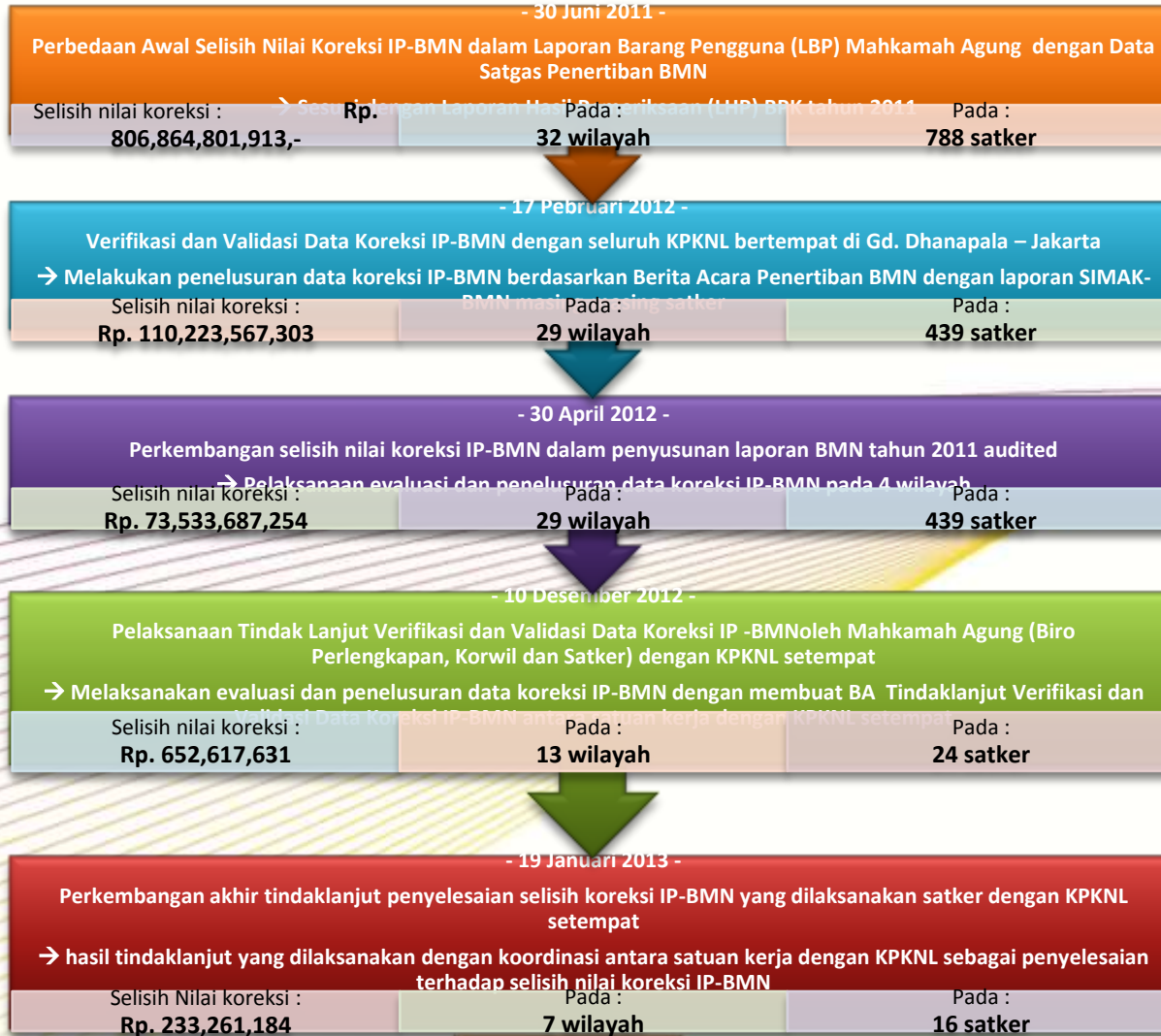
Peringkat Realisasi Anggaran K/L Nasional



REALISASI KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2012			
NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH SATUAN KERJA	REALISASI (%)
1	Mahkamah Konstitusi	1	99,13%
2	Badan Intelijen Negara (BIN)	1	98,93%
3	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten)	3	98,82%
4	Komisi Yudisial	1	97,92%
5	BSN	1	97,73%
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1	97,29%
7	Lembaga Sandi Negara	1	97,22%
8	Kementerian Dalam Negeri	756	97,21%
9	Badan SAR Nasional (Basarnas)	25	97,15%
10	Dewan Ketahanan Nasional (Watannas)	1	96,19%
11	Kementerian Sosial	277	95,79%
12	Mahkamah Agung	830	95,07%
13	BPKP	39	94,69%
14	Kementan	4040	92,97%
15	Kemenkeu	1070	90,69 %



Penertiban Barang Milik Negara



Data Terakhir perbedaan nilai koreksi menjadi hanya **Rp 130,394 Juta**





Bagian Kelima

**Pembinaan dan
Pengelolaan Sumber
Daya Manusia**



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Komposisi SDM Peradilan

JABATAN	MAHKA MAH AGUNG	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN		JUMLAH
		TK. BANDI NG	TK. PERTAMA	TK. BANDI NG	TK. PERTAMA	TK. BANDI NG	TK. PERTAMA	TK. BANDI NG	TK. PERTAMA	
Hakim *	68	515	3246	377	3093	12	81	40	268	7780
Panitera /Panitera Pengganti	70	495	4823	267	2931	8	53	73	341	8991
Jurusita	0	30	442	29	360	0	0	4	34	899
Tenaga Non Teknis	1456	1023	8073	736	4903	36	314	45	396	16982
TOTAL	1604	2063	16584	1409	11287	56	448	162	1039	34652

turun 3,71% sejak tahun 2010, yang total mencapai 35,988 orang





Bagian Keenam

**PERAN SERTA
MAHKAMAH AGUNG RI
DALAM FORUM
INTERNASIONAL**



<http://www.mahkamahagung.go.id>

MoU dengan *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia*



Pada Oktober 2012 Mahkamah Agung RI kembali menandatangani perpanjangan lampiran kerjasama yudisial dengan *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* yang ke delapan.

Kerjasama ini meliputi sektor pembaruan manajemen perkara, dan akses terhadap keadilan yang mencakup: penguatan pelaksanaan Mediasi, Mediasi pada hukum keluarga, gugatan perwakilan kelas (*class action*) dan kerjasama dalam mengkomunikasikan masalah akses terhadap keadilan.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Kunjungan kerja ke Hoge Raad Kerajaan Belanda



Kunjungan kerja ke Hoge Raad Kerajaan Belanda pada bulan Juni 2012 sebagai bagian dari dialog berkelanjutan antara kedua badan peradilan. Secara umum kerjasama dengan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda meliputi beberapa aspek tentang Hukum Materiil Pidana dan Perdata, serta aspek operasional untuk mendukung implementasi sistem kamar, khususnya dalam membahas transisi manajemen perkara dalam menuju sistem kamar.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Partisipasi di berbagai forum internasional, pelatihan/ lokakarya, serta kunjungan kerja terbatas



- *World Congress on justice Governance And Law Environmental Sustainability*, di Brazil, bulan Juni 2012,
- *Eleventh meeting of the Conference of the Parties (COP 11) to the Convention on Biological Diversity (CBD), Side Events- Judges*. Oktober 2012 di Hyderabad, India,
- *the Rountable For Asean Chief Justices On Environmental Law And Enforcement Melaka*, Malaysia, Desember 2012.
- *International Association Of Court Administration (IACA)* , Juni 2012 Di Belanda,
- kunjungan ke peradilan Mesir untuk mempelajari standardisasi di bidang sistem administrasi peradilan niaga dan pengembangan tenaga teknis tentang standardisasi tunjangan bagi aparatur peradilan.
- kunjungan kerja ke Washington DC dan Puerto Rico dalam rangka mempelajari Sistem Peradilan & Pengamanan Persidangan serta Sistem Pemenjaraan di Washington DC dan Puerto Rico, Amerika Serikat





Bagian Ketujuh

Reformasi BIROKRASI



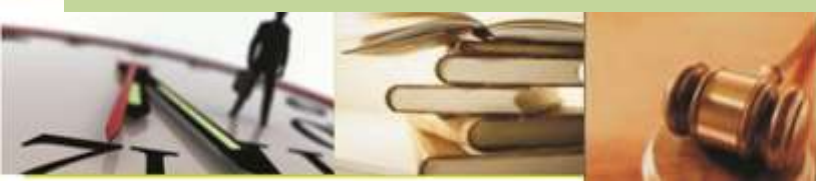
<http://www.mahkamahagung.go.id>



Penjaminan Mutu Reformasi Birokrasi

- Telah dilaksanakan proses Penjaminan Mutu Reformasi Birokrasi pada empat lingkungan peradilan di 10 propinsi di seluruh Indonesia yang meliputi DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
- Dari delapan area peningkatan yang dinilai, Total nilai akhir TQA atas Reformasi Birokrasi di MA adalah 70.59, dengan predikat “Cukup”.

TINDAK LANJUT:
Mahkamah Agung telah melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimulai sejak awal tahun 2012 dan secara simultan akan terus dilakukan dengan sistem sampel acak





Bagian Kedelapan
**PENGAWASAN
PERADILAN**



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Penandatanganan 4 SKB MA-KY:

- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/ 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim





Tahun 2102: 2376

Pengaduan Diterima BAWAS

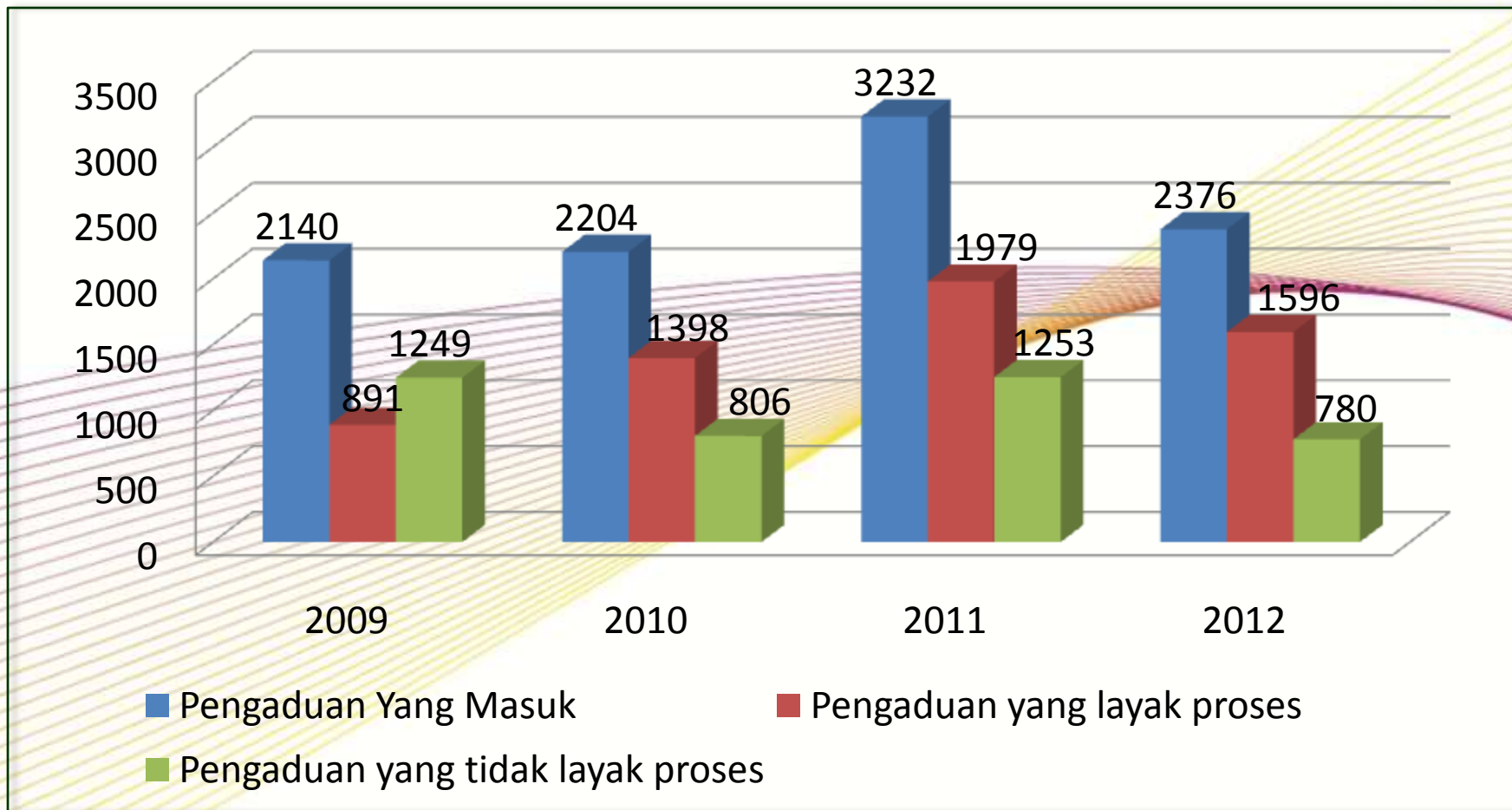


Ditelaah	409
Diperiksa Bawas (Pembentukan Tim Pemeriksa)	95
Dijawab dengan surat	354
Delegasi Pengadilan Tk. Banding	278
Delegasi Pengadilan Tk. Pertama	94
Delegasi Satuan kerja di Mahkamah Agung	45
Masih proses penyelesaian	321

[http:](http://)



Grafik Pengaduan 2009-2012



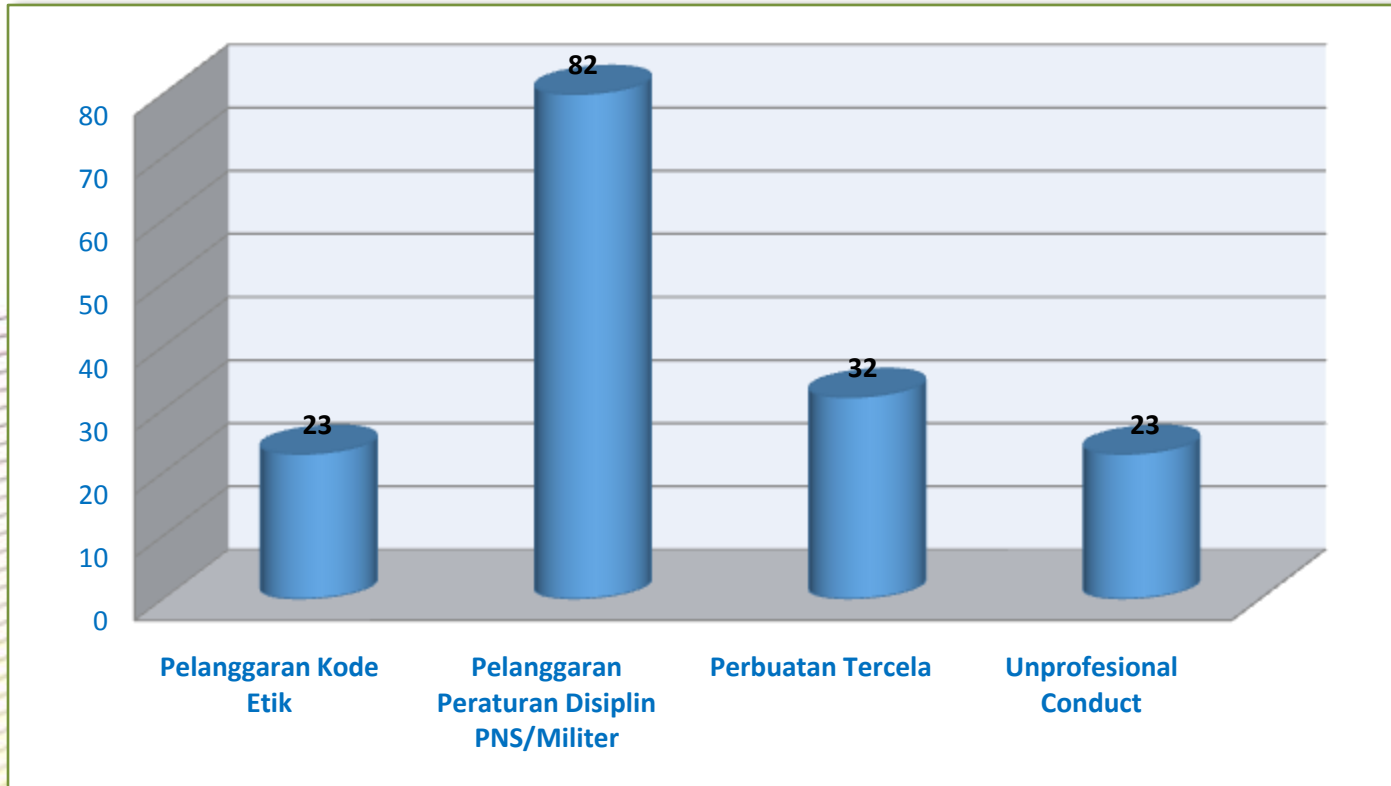
Penjatuhan Hukuman



No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah	Prosentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	20	8	36	64	40 %
	Hakim Ad Hoc	6	0	2	8	5 %
	Hakim Militer	0	0	1	1	1 %
2	Panitera/Sekretaris	7	2	4	13	8 %
3	Wakil Sekretaris	2	0	0	2	1 %
4	Wakil Panitera	2	0	4	6	4 %
5	Panitera Muda	1	0	9	10	6 %
6	Pejabat Struktural	3	2	1	6	4 %
7	Panitera Pengganti	7	0	4	11	7 %
8	Staf	14	3	10	27	17 %
9	Juru Sita	4	0	4	8	5 %
10	Juru Sita Penganti	3	1	0	4	2 %
JUMLAH		69	16	75	160	100 %



Jenis Pelanggaran



Jenis Hukuman yang Direkomendasikan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (2009-2012)



NO.	JENIS HUKUMAN	TAHUN				JUMLA H
		2009	2010	2011	2012	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	4	1	1	7
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1	2	3
3	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	2	-	-	-	2
4	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	1	-	-	1
5	Non Palu dan Dimutasikan	-	-	2	1	3
6	Teguran tertulis	-	-	1	-	1
	TOTAL	3	5	5	4	17





Bagian Kesembilan

PEMBARUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



<http://www.mahkamahagung.go.id>



- Badan Litbangdiklat Kumdil terus menjalankan kegiatan reguler pendicikan calon hakim terpadu dan pendidikan hakim berkelanjutan.
- PPC terpadu yang meliputi Magang II sebagai Panitera Pengganti selama 24 minggu, Diklat III sebagai Asisten Hakim selama 13 minggu, dan Magang III selama 30 minggu sebagai asisten hakim dan membantu hakim senior untuk menganalisa dan merumuskan putusan.



Sertifikasi Hakim Lingkungan



- Sepanjang 2012 Mahkamah Agung terus mendorong proses penyiapan sertifikasi hakim lingkungan. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* tentang penegakan Hukum Lingkungan, telah terus menggulirkan proses implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum bagi pengembangan sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam sistem peradilan di Indonesia.
- Setelah berbagai proses persiapan tersebut, maka pada bulan Nopember 2012 telah dilakukan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 33 orang.





Akreditasi Pusdiklat Menpim



Pada tahun 2012 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung telah berhasil memperoleh **akreditasi “A”** dari Lembaga Administrasi Negara dengan sebagai **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan Tingkat III dan IV untuk masa berlaku lima tahun**

- Pemberian Akreditasi ini adalah salah satu bentuk pengakuan pemerintah atas terpenuhinya standar yang seharusnya dimiliki oleh suatu lembaga Diklat Aparatur Negara



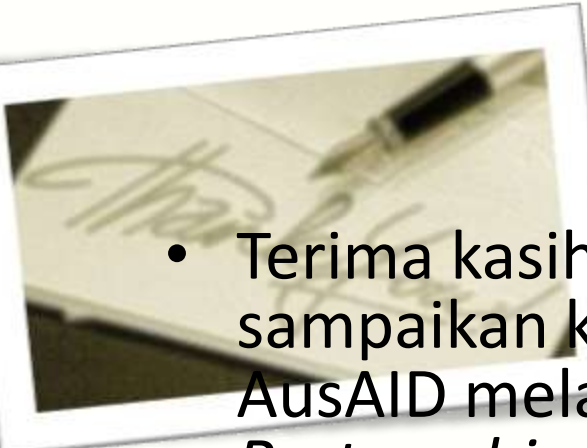


Terima Kasih


- Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan pada lembaga-lembaga pemerintahan RI seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial serta Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi III, Komisi Anggaran BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, serta lembaga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

<http://www.mahkamahagung.go.id>



- 
- Terima kasih dan penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada lembaga-lembaga seperti AusAID melalui AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*), USAID melalui program C4J (*Change for Justice*), The Asia Foundation, The Netherland Embassy, UNODC (*United Office on Drugs and Crime*), ILO (*International Labour Organization*), dan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melalui *Office of Overseas Prosecutorial and Development Agency and Training* (OPDAT), serta semua mitra dari negara sahabat yang mungkin tidak dapat saya ucapkan satu per satu.





Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari universitas, masyarakat sipil, dan seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan terwujudnya peradilan yang agung di Indonesia. Sumbangsih yang diberikan sangat bernilai untuk memberikan dorongan dalam melakukan pembaruan peradilan.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Terima Kasih



<http://www.mahkamahagung.go.id>